

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada sub-bab ini dijelaskan mengenai studi-studi terdahulu, dimana berisi mengenai hasil penelitian terdahulu, fokus penelitian yang sama dan pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain dari itu, hasil penelitian terdahulu juga membantu menjadi bahan acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Berikut tabel yang menerangkan tentang penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Teori	Intisari
1	Ranggi Ade Febrian (2016) <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi)	Teori <i>Collaborative Governance</i> dari Stepahan Balogh (2011).	<ul style="list-style-type: none">- Penelitian ini mendeskripsikan proses kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melalui sebuah konsesus, dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terkait dengan kepentingan dan potensi masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama.- Penelitian ini juga menjelaskan mengenai tiga dimensi <i>Collaborative Governance</i> yaitu system context, drivers, dan dinamika kolaborasi. Tiga Dimensi <i>Collaborative Governance</i> oleh Stepahan Balogh (2011) dijadikan landasan analisis oleh penulis untuk memaparkan kolaborasi pemerintah dalam pembangunan kawasan perdesaan yang substansinya memerlukan keterlibatan beberapa pihak bukan hanya pemerintah desa untuk percepatan pembangunan, pelayanan dan pemeberdayaan masyarakat desa.
2	Devi Arianti dan Lena Satlita (2018)	Teori <i>Collaborative</i>	<ul style="list-style-type: none">- Penelitian ini mendeskripsikan proses kolaborasi yang dilakukan pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam

	<p><i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros Di Desa Tirtoharjo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul</p>	<p><i>Governance</i> dari Ansell dan Gash (2007)</p>	<p>dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros dilakukan dengan konsep agro silvo fishery. Konsep ini merupakan salah satu usaha yang mempunyai tujuan ganda yaitu ekologi dan ekonomi. Secara ekologi melaksanakan konservasi mangrove dan usaha peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pertanian dan perikanan.</p> <p>- Penelitian ini , peneliti menggunakan indikator proses collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007) yaitu: : (1) Face to Face Dialogue (dialog/tatap muka), (2) Trust Building (Membangun Kepercayaan), (3) Commitment to Process (Komitmen Bersama), (4) Shared Understanding (Pemahaman Bersama), dan (5) Intermedite outcome (Pencapaian hasil).</p>
3	<p>Mia Fairuza (2017) Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)</p>	<p>Teori <i>Collaborative Governance</i> dari pemikiran beberapa ahli seperti Robert Agranoff dan Michael McGuire, Ann Marie Thomson dan James L. Perry, Chris Ansell dan Alison Gash , dan Debbie Roberts, Rene van Wyk, dan Nalesh Dhanpat</p>	<p>- Penelitian mendeskripsikan bagaimana kolaborasi antara pemangku kepentingan industri pariwisata di Pulau Merah (Pulau Merah), Wilayah Banyuwangi. Peneliti ini berupaya untuk bagaimana memahami pencapaian kolaborasi yang berkaitan dengan pengembangan inklusif. Pembangunan inklusif adalah pendekatan terbaru dari paradigma pembangunan, dimana pembangunan inklusif berupaya mendistribusikan manfaat pembangunan secara merata dengan melibatkan masyarakat lokal dan melestarikan lingkungan.</p> <p>- Penelitian ini menggunakan komponen-komponen kolaborasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Robert Agranoff dan Michael McGuire, Ann Marie Thomson dan James L. Perry, Chris Ansell dan Alison Gash , dan Debbie Roberts, Rene van Wyk, dan Nalesh Dhanpat. Komponen-komponen pada penelitian ini diantaranya (1) pemahaman/tujuan bersama, (2) administrasi, (3) kepercayaan, (4) komitmen, (5)</p>

			mutualitas, (6) komunikasi, (7) lingkungan kolaborasi.
4	<p>Ahmad Sururi (2018)</p> <p><i>Collaborative Governance</i> Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama)</p>	<p>Teori <i>Collaborative Governance</i> dari Ansell dan Gash (2007)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini ingin mengidentifikasi prioritas dan isu strategis dan untuk mengembangkan model inovatif kebijakan Tata Kelola Berbasis Kolaborasi pada Studi revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Alam Banten Lama. - Hasil dari penelitian ini menggunakan Dimensi Struktural Birokrasi antar Pemerintahan Daerah, Sosialisasi Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Banten Lama, dan Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Kawasan Cagar Budaya Ke Kawasan Penunjang Wisata (KPW). - Selain itu, peneliti juga mencoba mengembangkan sebuah model inovasi kebijakan <i>collaborative governance</i> dalam revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama yang terdiri dari empat komponen penting yaitu komponen pertama kondisi awal yang terdiri dari kondisi eksisting Banten Lama, resource, dasar pertimbangan dan ekonomi politik will; komponen kedua adalah komitmen terhadap proses dan hasil yang terdiri dari trust, kesamaan pemahaman dan legitimasi internal dan eksternal; komponen ketiga adalah desain kelembagaan yang terdiri dari struktural dan prosedural kelembagaan, kepemimpinan, bentuk proses kerjasama; komponen keempat adalah kondisi akhir yang terdiri dari tindak lanjut dan keberlanjutan.
5	<p>Tika Mutiarawati dan Sudarmo (2017)</p> <p><i>Collaborative Governance</i> dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan</p>	<p>Teori <i>Collaborative Governance</i> dari DeSeve dalam Mutiarawati, Tika, dan Sudarmo (2017)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata pemerintahan yang kolaboratif antara para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan banjir pasang surut di Kelurahan Bandengan dan untuk mengetahui faktor yang menghambatnya. - Penelitian ini menggunakan teori De Seve Mutiarawati, Tika, dan Sudarmo

			<p>(2017). DeSeve menyebutkan bahwa terdapat delapan item penting yang bisa dijadikan ukuran keberhasilan sebuah network atau kolaborasi dalam governance, delapan item tersebut antara lain: (1) Networked structure (struktur jaringan), (2) Commitment to a common purpose (komitmen terhadap tujuan), (3) Trust among the participants (adanya saling percaya diantara pelaku/peserta), (4) Governance (kejelasan dalam tata kelola), (5) Access to authority (akses terhadap kekuasaan), (6) Distributive accountability/responsibility (pembagian akuntabilitas/responsibilitas), (7) Information sharing (berbagi informasi), (8) Access to resources (akses sumber daya).</p>
6	<p>Abdul mahsyar (2015) Public Private Partnership: Kolaborasi Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Asset Publik Di Kota Makassar</p>	<p><i>Collaborative Governance</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model kerja sama antara Pemerintah Makassar sebagai birokrasi dengan sektor swasta dalam kerangka kerja kolaboratif pemerintahan, dan melihat efektivitas kerja sama tersebut untuk kepentingan publik. - Hasil dari penelitian ini penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar menyerahkan pengelolaan aset publik ke sektor swasta karena sumber daya yang terbatas seperti manajemen dana konstruksi dan pemeliharaan, fasilitas dan personil. Dengan kerja sama antar kolaboratif sektor swasta, pengembangan aset publik dapat dilakukan dengan cepat dan meminimalkan penggunaan anggaran pemerintah daerah.
7	<p>Sri Yuliani dan Gusty Putri Dhini Rosyida (2017) Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa</p>	<p>Teori Kolaborasi, kolaborasi yang digunakan pada penelitian ini</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian bertujuan mendeskripsikan bagaimana proses perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Surakarta khususnya tentang bagaimana proses kolaborasi dalam perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di

	Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta	adalah prinsip-prinsip Kolaborasi yang tercantum dalam Surat Edaran Direktorat Jirden Cipta Karya No 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program KOTAKU	Kelurahan Semanggi Kota Surakarta serta hambatan apa saja yang terjadi. - Pada Penelitian ini ditemukan jika kolaborasi dalam Perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta tidak berjalan lancar sesuai dengan konsep kolaborasi Surat Edaran E DJCK No 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Program KOTAKU tentang Prinsip-prinsip kolaborasi yang mendasari dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh.
8	Widuri Wulandari, Suranto, dan Eko Priyo Purnomo (2019) <i>Collaborative Government</i> dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik	kinerja birokrasi, implementasi kebijakan, dan <i>collaborative governance</i>	- Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis Implementasi Inovasi Pelayanan Publik Kegiatan Sunmor Sembada Minggu Pahingan di Kecamatan Sleman. Mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari Implementasi Kegiatan Sunmor Sembada Minggu Pahingan (SSMP) di Kecamatan Sleman. - Penelitian ini menggunakan teori kinerja birokrasi dalam menjalankan pelayanan publik dan ditambahkan dengan teori faktor keberhasilan implementasi kebijakan. - Dalam penelitian ini faktor <i>collaborative governance</i> menjadi indikator penting dalam mempengaruhi bagaimana berjalannya proses implentasi kebijakan. Dimana indikator <i>collaborative governance</i> yang dimaksud adalah indikator komunikasi.

Sumber : Diolah peneliti, 2019

Berdasarkan penelusuran mengenai penelitian terdahulu yang telah ditampilkan pada tabel 2.1 di atas, maka penelitian yang peneliti tulis mengenai Model *Collaborative Governance* antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Dalam Pengelolaan Pantai Duta Di Kabupaten Probolinggo memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada penelitian Model *Collaborative Governance* antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Pantai Duta Di Kabupaten Probolinggo, peneliti menggunakan teori dari Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012), sedangkan penelitian-penelitian terdahulu masih menggunakan teori dari Ansell dan Gash, De Seve, dan teori-teori *collaborative governance* dari pemikiran ahli lainnya.

B. Gambaran Umum Konsep *Collaborative Governance*

Salah satu bentuk konsep penyelenggaraan pemerintahan atau governance yang akhir-akhir ini menjadi kajian penting dan menarik dalam konteks studi ilmu pemerintahan adalah konsep *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Ansell dan Gash (2007) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai berikut ini:

“A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.”

(sebuah pemerintahan yang mengatur satu atau lebih lembaga lembaga publik pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik).

Disamping pendapat tersebut, pendapat lain mengenai *collaborative governance* dikemukakan oleh Kirk Emerson *et.al.* (2011) yang menyatakan *collaborative governance* sebagai:

“the processes and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public

agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished”.

(proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang-orang secara konstruktif pada batas-batas lembaga-lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai jika dilakukan satu pihak saja).

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Berbagai macam alasan yang melatar belakangi munculnya kolaborasi di tiap lembaga atau institusi. Junaidi (2015) menyebutkan bahwa *Collaborative governance* tidak muncul secara tiba-tiba, ada penyebab munculnya *collaborative governance* oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong dilakukannya sebuah proses kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. *Collaborative Governance* atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi (Ansell dan Gash, 2007). Menurut Ansell and Gash dalam Putro (2014) *collaborative governance* muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi
2. Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam
3. Upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik
4. Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan.

5. Ketidakmampuan kelompok-kelompok, terutama karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan.
6. Mobilisasi kelompok kepentingan
7. Tingginya biaya dan politisasi regulasi
8. Pemikiran-pemikiran yang semakin luas tentang pluralisme kelompok kepentingan
9. Adanya kegagalan akuntabilitas manajerialisme (terutama manajemen ilmiah yang semakin dipolitisasi) dan kegagalan implementasinya.

1. Komponen-komponen *Collaborative Governance*

Dalam skolarisasi terdapat komponen-komponen yang menjadi indikator penting keberhasilan kolaborasi itu sendiri. Komponen-komponen tersebut saling melengkapi satu sama lain, sehingga kolaborasi akan berhasil apabila memenuhi semua komponen. Berikut ini akan dijelaskan komponen-komponen *collaborative governance* dari beberapa ahli :

a. Robert Agranoff dan Michael McGuire

Agranoff dan McGuire (2003) memandang kolaborasi sebagai aktivitas-aktivitas yang bersifat horizontal dan vertikal. Kemudian, aktivitas tersebut dianalisis melalui komponen-komponen sebagai berikut:

1) Komunikasi

Komunikasi yang intensif sangatlah penting dalam kolaborasi. Kolaborasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dapat melalui perantara teknologi. Komunikasi melalui

perantara akan lebih efektif diterapkan pada kolaborasi yang terdapat konflik antar aktor (Fairuza, 2017).

2) Nilai tambah

Nilai yang dimaksud disini adalah nilai publik, yakni yang dihasilkan dari efisiensi, demokrasi dalam institusi/organisasi, dan proses kolaborasi. Permasalahan dalam menciptakan nilai publik adalah adanya tingkat kepentingan, urgensi, ruang lingkup permasalahan yang meranah lintas-sektoral, sehingga menyadarkan bahwa pemerintah sendiri tidak mampu menciptakan bagian penting dari nilai publik itu sendiri (Muqorrobin dalam Fairuza, 2017), sehingga diperlukan kolaborasi dengan aktor non-pemerintah.

3) Deliberasi

Deliberasi merupakan kelebihan dari kolaborasi yang membentuk pembelajaran saling menguntungkan (mutual learning), pembangunan komunitas (building communities), dan pemanfaatan proses interaktif (employing interactive) (Fairuza, 2017).

b. Ann Marie Thomson dan James L. Perry

Dimensi merupakan himpunan yang terdiri dari komponen-komponen tertentu yang menyusun sebuah konsep dan memiliki hubungan ketergantungan antar komponen (Mustafa dalam Fairuza, 2017). Thomson dan Perry dalam tulisannya yang berjudul “Collaboration Processes: Inside The Black Box” berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) kunci dimensi kolaborasi (Thomas dan Perry, 2006), yaitu sebagai berikut:

1) Dimensi Tata Pemerintahan (The Process of Collaborative Governing: The Governance Dimension)

Dimensi pemerintahan berkaitan dengan pengambilan keputusan bersama (joint decision making), pengaturan pembagian daya, dan pemecahan masalah. Pada dimensi pemerintahan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut: (1) struktur hierarki dan otoritas tidak mendominasi; (2) kesadaran bahwa pihak yang berkolaborasi tidak hanya secara langsung bertanggung jawab untuk mencapai kesepakatan tetapi juga harus memaksakan keputusan pada diri mereka sendiri; (3) ketersediaan untuk menerima bahwa semua pihak yang berkolaborasi memiliki kepentingan yang sah sehingga hasilnya mencerminkan konsensus kelompok, bukan kekuatan koalisi atau kekuatan politik; dan (4) pemahaman bahwa pemerintahan harus menekankan keterbukaan informasi, menghormati pendapat orang lain, dan melalui negosiasi yang panjang dalam mencapai kesepakatan (Thomas dan Perry dalam Fairuza, 2017).

2) Dimensi Administrasi (The Process of Collaborative: The Administration Dimension)

Dimensi administrasi dalam kolaborasi sangat penting dalam keberlangsungan hubungan pihak-pihak yang berkolaborasi. Struktur administrasi dalam kolaborasi memiliki posisi sentral untuk koordinasi komunikasi, pengorganisasian dan penyebaran informasi, serta mengupayakan pihak-pihak yang berkolaborasi untuk bersama-sama mengatur hubungan mereka, dimana Freitag dan Winkler menyebutnya sebagai “sosial koordinasi”. Indikator dalam dimensi administrasi adalah kejelasan peran dan tanggung jawab setiap aktor, pertemuan kerja sama yang efektif, kejelasan tujuan, tugas-tugas terkoordinasi dengan baik,

terdapat saluran komunikasi yang formal, dan pemantauan dalam pelaksanaan kolaborasi (Thomson, Perry, and Miller dalam Fairuza, 2017).

3) Dimensi Otonomi (The Process of Reconciling Individual and Collective Interest: The Autonomy Dimension)

Dimensi otonomi memiliki hubungan yang kontras antara kontrol bersama dan kontrol individu (Wood dan Grey dalam Fairuza, 2017). Dalam sebuah kolaborasi, aktor yang terlibat melindungi identitas mereka dengan mempertahankan kontrol individu. Di sisi lain, kontrol bersama melibatkan ketersediaan mitra untuk berbagi informasi, bukan hanya tentang operasi organisasi mereka sendiri, tetapi juga tentang apa yang mereka bisa dan tidak bisa dalam berkolaborasi.

Dimensi otonomi mencoba untuk menangkap ketegangan yang implisit antara kepentingan aktor dan kepentingan bersama. Indikator dimensi otonomi ini berkaitan dengan sejauh mana aktor melihat kolaborasi sebagai penghalang misi organisasi, kepercayaan bahwa keuntungan mereka dipengaruhi oleh kolaborasi, dan kesadaran aktor untuk berusaha memenuhi harapan organisasi dan harapan aktor lain dalam kolaborasi (Fairuza, 2017)

4) Dimensi Mutualitas (The Process of Forging Mutually Beneficial Relationship: The Mutuality Dimension)

Dimensi mutualisme berakar pada saling ketergantungan. Sebuah organisasi harus mengalami saling ketergantungan baik dalam kesamaan kepentingan maupun perbedaan kepentingan, yang kemudian disebut Powell dalam Fairuza (2017) sebagai “complementarities”. Komplementaritas menjelaskan situasi dimana suatu organisasi mengorbankan haknya untuk mendapatkan daya dari organisasi lain demi mencapai kepentingan mereka sendiri. Dalam kolaborasi, adanya saling

ketergantungan merupakan kunci yang penting agar hubungan antar aktor terus terjalin dengan baik.

5) Proses Membangun Norma Sosial: Kepercayaan dan Dimensi Timbal Balik (The Process of Building Social Capital Norms: The Trust and Reciprocity Dimension)

Dalam kolaborasi, aktor individu akan menunjukkan kesediaan untuk berinteraksi dalam kolaborasi jika aktor yang lain juga menunjukkan kesediaan yang sama. Hubungan timbal balik tersebut akan membentuk kepercayaan antar pihak-pihak yang berkolaborasi jika dilakukan secara berulang-ulang. Adanya kepercayaan antar pihak-pihak yang berkolaborasi memberikan manfaat terhadap kelangsungan kolaborasi, yakni: (1) membuat itikad baik, pihak-pihak yang berkolaborasi akan berperilaku sesuai komitmen eksplisit dan implisit; (2) jujur dalam negosiasi apapun; (3) pihak-pihak yang berkolaborasi tidak akan mengambil keuntungan yang lebih meskipun terdapat kesempatan (Cummings dan Bromiley dalam Fairuza, 2017).

c. Chris Ansell dan Alison Gash

Ansell dan Gash berpendapat bahwa dalam kolaborasi terdapat komponen-komponen yang membentuk siklus dan mempengaruhi satu sama lain (Ansell dan Gash, 2007).

1) Dialog antar-muka (*face to face dialogue*)

Dialog antar-muka sebagai bentuk komunikasi menjadi hal yang penting dalam kolaborasi, karena adanya proses pembentukan konsesus. Komunikasi langsung (*face to face*) merupakan upaya untuk mengurangi stereotipe (yaitu persepsi aktor yang memandang adanya sisi buruk aktor lain) dan meningkatkan

rasa hormat antar aktor. Dengan adanya komunikasi langsung, para aktor yang terlibat dalam kolaborasi menjadi lebih objektif dalam berinteraksi (Fairuza, 2017).

2) Membangun kepercayaan (*trust building*)

Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan memerlukan waktu yang tidak singkat, hal ini karena dalam kolaborasi diperlukan komunikasi yang intensif (terusmenerus) dan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dari munculnya kembali konflik masa lalu (*prehistory antagonism*). Ansell dan Gash (2007) mengemukakan argumentasinya sebagai berikut:

“If the prehistory is highly antagonistic, then policy makers or stakeholders should budget time for effective remedial trust building. If they cannot justify the necessary time and cost, then they should not embark on a collaboration strategy (Ansell dan Gash, 2007)”

Pembuat kebijakan atau stakeholders harus mengalokasikan waktu untuk melakukan remedial pembangunan kepercayaan secara efektif. Apabila tidak, maka kolaborasi tidak seharusnya dilakukan.

3) Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*)

Komitmen merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli para aktor dalam kolaborasi. Komitmen dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni (1) mutual recognition yaitu berkaitan dengan pengakuan bersama; (2) joint appreciation yakni apresiasi bersama para aktor; (3) kepercayaan antar aktor; (4) ownership the process (rasa memiliki pada proses), hal ini berkaitan dengan pengaruh setiap aktor dalam pengambilan keputusan namun memiliki dilema, karena adanya kompleksitas

dalam kolaborasi; (5) interdependence yakni saling ketergantungan antar aktor. Perbedaan kapasitas yang dimiliki para aktor memunculkan rasa ketergantungan yang dapat menumbuhkan dan memperkuat komitmen (Fairuza, 2017).

4) Pemahaman bersama (*shared understanding*)

Pemahaman bersama merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai common mission (misi umum), common purpose (tujuan umum), common objectives (obyektivitas umum), dan shared vision (visi bersama). Pemahaman yang dimaksud adalah penyatuan pemikiran dan persamaan tujuan, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antar aktor (Fairuza, 2017).

5) Dampak sementara (*intermediate outcomes*)

Dampak sementara terjadi selama proses kolaborasi, oleh karena itu ada kata “sementara” di dalamnya. Dampak sementara menghasilkan feedbacks. Umpan balik yang diharapkan adalah umpan balik yang positif, yang disebut “small-wins” (kemenangan kecil) atau Roberts dan Bradley (1991) menyebutnya sebagai temporal property. Kemenangan kecil ini akan meningkatkan harapan masing-masing aktor dalam kolaborasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen (Fairuza, 2017).

d. Debbie Roberts, Rene van Wyk, dan Nalesh Dhanpat

Dalam temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Roberts et al. (2016) yang berjudul “Exploring Practices for Effective Collaboration” terdapat lima kunci kolaborasi, yakni sebagai berikut:

1) Tujuan Umum (*common purpose*)

Visi bersama adalah faktor kunci kolaborasi yang akan membawa para aktor tetap bersama-sama mencapai tujuan tersebut.

2) Mutualitas (*mutuality*)

Mutualitas terjadi ketika masing-masing pihak memberikan kontribusi sumber daya sehingga pihak lain memperoleh manfaat, misalnya saling bertukar informasi. Kesamaan misi, budaya, dan komitmen terhadap tujuan kolaborasi membantu memfasilitasi pertukaran sumber daya (Fairuza, 2017).

3) Lingkungan yang memungkinkan (*enabling environment*)

Lingkungan kolaboratif terdiri dari lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan pemimpin kolaborasi. Lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja para aktor dalam menjalankan kolaborasi. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan sebuah lingkungan kolaboratif dengan cara menghubungkan keahlian dan pengetahuan para aktor (Fairuza, 2017).

4) Kepercayaan (*trust*)

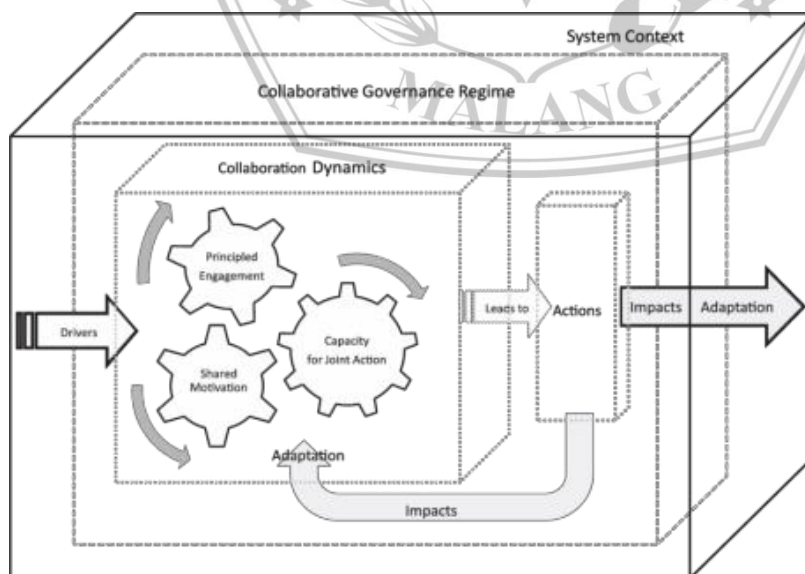
Kepercayaan adalah salah satu faktor yang paling mendasari keberhasilan kolaborasi. Kepercayaan didasarkan pada keyakinan bahwa para aktor akan jujur dalam perjanjian dan mematuhi komitmen mereka dan tidak mengeksploitasi pihak lain. Adanya kontrol formal yang berlebihan dapat mengurangi kepercayaan antar aktor karena kontrol dianggap sebagai tanda ketidakpercayaan mengenai kemampuan dan karakter para aktor (Fairuza, 2017).

5) Karakteristik pribadi tertentu (*specific personal characteristics*)

Dalam sebuah kolaborasi, para aktor harus terbuka dan mampu memahami motif dan kepentingan aktor lain. Pemahaman karakteristik aktor yang berkolaborasi dapat menumbuhkan kompromi sebagai konsekuensi dari pembuatan keputusan bersama dimana terdapat kepentingan aktor yang tidak terjawab dalam keputusan tersebut (Fairuza, 2017).

2. Proses *Collaborative Governance*

Dalam menentukan komponen kolaborasi sebagai alat analisis dalam penelitian ini, peneliti memilih teori ahli Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012), karena peneliti melihat adanya keterpaduan komponen kolaborasi yang tepat digunakan dalam menjawab permasalahan. Teori proses kolaborasi atau *Collaborative Governance Regime (CGR)* menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus, dengan menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak sementara, sebelum mengarah pada dampak utama, serta adaptasi terhadap dampak sementara.



Gambar 2.1 Teori Collaborative Governance menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh.

Sumber: Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012

Penelitian ini menggunakan berbagai komponen yang terdapat di dalam CGR untuk mengungkap fenomena kolaborasi. Berbagai komponen yang menjadi proses kolaborasi diantaranya adalah 1) dinamika kolaborasi, 2) tindakan-tindakan kolaborasi, dan 3) dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi.

a. Dinamika Kolaborasi

Beberapa ahli menggambarkan bagaimana proses kolaborasi sebagai sebuah tahapan linier yang terjadi dari waktu ke waktu, dimulai dari pendefinisian masalah menuju setting agenda hingga implementasi. Berlawanan dengan Ansell dan Gash (2007) serta Thomson dan Perry (2006), Emerson (2012) melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang oriteratif. Emerson fokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi. Komponen tersebut antara lain : Penggerakan prinsip bersama (Principled engagement), motivasi bersama (shared motivation) dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (capacity for joint action).

1) Penggerakan Prinsip Bersama (Principled engagement)

Penggerakan prinsip bersama merupakan hal yang terjadi dari waktu ke waktu dalam kolaborasi. Beberapa hal seperti dialog tatap-muka, atau melalui perantara teknologi adalah cara untuk bagaimana menggerakkan prinsip bersama. Di dalam komponen ini terdapat penegasan kembali tujuan bersama, pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip bersama, yang sering diungkap dalam berbagai perspektif aktor yang terlibat. Oleh karena itu, penyatuan prinsip merupakan inti dari hal ini (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012).

Karakteristik masing-masing aktor, merupakan elemen penting yang mempengaruhi seberapa baik prinsip bersama itu berjalan. Langkah awal kritis yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah memilih aktor yang akan terlibat di dalam kolaborasi. Selanjutnya, setelah kolaborasi berjalan dan berkembang, penambahan aktor pun dapat dimungkinkan. Kemudian barulah kegiatan penggerakan prinsip bersama dapat terwujud, hal itu dijelaskan dalam tiga elemen berikut:

a) Pengungkapan (*discovery*)

Mengungkap kepentingan masing-masing aktor, nilai-nilai aktor, serta upaya konstruksi kepentingan bersama. Pengungkapan pada aktor kolaborasi, dan individu di dalamnya, dapat dianalisis dari kepentingan aktor tersebut bergabung di dalam kolaborasi (Ist, 2016).

b) Deliberasi (*deliberation*)

Deliberasi pada kolaborasi terbentuk dengan adanya diskusi bersama. Seluruh aktor yang tergabung di dalam kolaborasi menyatakan bahwa diskusi harus berjalan terbuka, artinya terdapat dorongan untuk mengemukakan pendapat, terlihat dari presentasi masing-masing terhadap pencapaian kegiatan yang telah dilakukan (Ist, 2016).

c) Determinasi

Merupakan serangkaian tindakan penetapan bersama akan tujuan kolaborasi. Determinasi memiliki dua jenis, yaitu primer dan substantif. Determinasi primer lebih mengarah kepada pembuatan keputusan prosedural, (teknis kolaborasi, penetapan agenda, jadwal pertemuan, kelompok kerja). Determinasi substantif

lebih kepada pembentukan kesepakatan bersama, rekomendasi final tindakan kolaborasi ke depan (Ist, 2016).

2) Motivasi bersama (*shared motivation*)

Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) mengemukakan bahwa motivasi bersama merupakan sebuah siklus penguatan diri yang terdiri dari empat elemen saling menguntungkan diantaranya : kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen. Penjelasannya sebagai berikut:

a) Kepercayaan Bersama (*mutual trust*)

Menurut Fisher dan Brown dalam Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) kepercayaan bersama akan berkembang seiring dengan keterlibatan pihak-pihak pada saat melakukan kolaborasi, mengenal satu sama lain dan saling membuktikan bahwa diri mereka dapat dipercaya, bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Kepercayaan merupakan bagian vital dan mutlak dalam kemajuan kolaborasi. Sebagai contoh, misal dalam sebuah kerjasama, kepercayaan sangat berperan penting dalam mengurangi biaya transaksi, meningkatkan nilai investasi dan menjaga stabilitas dalam hubungan serta merangsang pembelajaran bersama, pertukaran pengetahuan dan inovasi (Koppenjan dan Klijn dalam Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012).

b) Pemahaman bersama (*mutual understanding*)

Maksudnya dari pemahaman bersama adalah sesama aktor harus saling mengerti dan menghargai perbedaan. Pemahaman bersama menuju pada kualitas interaksi interpersonal individu dan organisasi. Pembentukan pemahaman bersama biasanya dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk di dalam proses kolaborasi (Ist, 2016).

c) Legitimasi internal (*internal legitimitation*)

Legitimasi internal merupakan pengakuan yang berasal dari internal kolaborasi. Dalam hal ini aktor-aktor yang terlibat di dalam berkolaborasi dituntut untuk dapat dipercaya, dan kredibel terhadap kepentingan bersama. Aktor-aktor kolaborasi wajib menyadari bahwa ada rasa ketergantungan antar aktor yang akan menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan. Legitimasi internal, pemahaman bersama, dan kepercayaan bersama merupakan tiga elemen yang saling terkait erat satu sama lain dalam komponen motivasi bersama, sehingga untuk elemen selanjutnya, yaitu komitmen juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kualitas tiga elemen ini (Arrozaaq, 2016).

d) Komitmen

Merupakan upaya kuat dalam pelaksanaan kolaborasi dari aktor sehingga mampu menghilangkan berbagai hambatan-hambatan yang seringkali muncul karena perbedaan karakteristik dan kepentingan aktor (Ist, 2016).

3) Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Yang dimaksud adalah berbagai hasil dari elemen-elemen lintas fungsional untuk menghasilkan tindakan yang efektif, karena adanya kapasitas memadai dari aktor.

a) Prosedur dan Kesepakatan Bersama

Meliputi aturan-aturan umum, protokol - protokol kegiatan, dan aturan untuk membuat keputusan, yang semua itu dapat diwujudkan melalui kesepakatan informal dan formal. Namun, pada kolaborasi yang kompleks, dan berdurasi panjang, dibutuhkan lebih pada kesepakatan yang formal, seperti membentuk landasan hukum kolaborasi (Ist, 2016).

b) Kepemimpinan (oleh pemimpin kolaborasi)

Mempunyai peran mutlak dalam proses kolaborasi. Berbagai perannya adalah (1) sebagai pihak yang menggali dukungan untuk kolaborasi, (2) penginisiasi pertemuan, (3) fasilitator dan mediator, (4) representasi dari aktor dan kolaborasi secara keseluruhan, (5) pendistributor pengetahuan, (6) mendorong penggunaan teknologi dalam kolaborasi, serta (7) melakukan advokasi pada publik (Ist, 2016).

c) Pengetahuan

Merupakan segala informasi yang diperlukan oleh aktor untuk berpartisipasi di dalam proses kolaborasi. Pengetahuan adalah informasi yang dipahami oleh aktor, sehingga berguna bagi mereka. Pengetahuan yang tidak disalurkan dengan baik akan dapat membingungkan aktor kolaborasi, karena kerancuan informasi yang di peroleh. Pada kolaborasi, pengetahuan sebagian besar disalurkan pada pertemuan bersama. Di dalam pertemuan tersebut, terdapat penyampaian hasil-hasil yang telah dicapai dari masing-masing aktor, kemudian diskusi dan pembuatan keputusan bersama yang merupakan pengetahuan penting dan dibutuhkan (Ist, 2016).

d) Sumber Daya

Sumber daya adalah: i) pendanaan finansial, pembagian waktu dan peran, iii) dukungan teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan, iv) saling melakukan pendampingan, v) kebutuhan keahlian analisis kolaborasi, dan vi) implementor di lapangan, serta vii) kebutuhan ahli. Pada kolaborasi, tidak ada yang namanya sumber dana bersama. Pendanaan kolaborasi dilakukan dengan menganggarkan dari masing-masing aktor, karena pelaksanaan kegiatan terintegrasi dengan kegiatan mereka (Ist, 2016).

b. Tindakan-tindakan Kolaborasi

Tindakan-tindakan dalam kolaborasi pada prakteknya sangat beragam, dan merupakan cerminan daripada dinamika kolaborasi. Tindakan-tindakan dalam kolaborasi merupakan inti dari kerangka *Collaborative Governance*. Menurut Innes dan Booher dalam Emerson (2012) tindakan-tindakan kolaborasi merupakan hasil utama dari proses kolaborasi linier yang terkadang dikaitkan dengan dampak. Hal ini dikarenakan pada dasarnya proses dan hasil tidak dapat dipisahkan dari dampak itu sendiri. Menurut Huxam dalam Emerson (2012), beberapa tindakan kolaborasi memiliki tujuan sangat luas seperti penentuan langkah strategis dalam isu/bidang kebijakan kesehatan. Namun banyak pula tindakan kolaborasi yang memiliki tujuan sempit seperti proyek pengumpulan dan analisis informasi spesifik. Tindakan kolaboratif ada yang bisa dilakukan secara sekaligus oleh seluruh stakeholders dan ada pula yang hanya bisa dilakukan oleh stakeholder tertentu dengan kapasitas masing-masing stakeholder (Ist, 2016).

Beberapa hasil tindakan kolaborasi telah berjalan dengan baik diantaranya dengan adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh seluruh aktor kolaborasi, sehingga dapat menghasilkan masukan yang beragam untuk kemajuan kolaborasi. Namun, terdapat juga beberapa hal yang belum maksimal, diantaranya: (1) berbagai macam tindakan kolaborasi yang telah dilakukan, seperti pertemuan bersama, kegiatan-kegiatan di lapangan, dan kegiatan monitoring dan evaluasi, namun hal ini masih dilakukan oleh segelintir aktor saja dan terdapat bahwa sebagian besar dari hal tersebut belum baik, (2) pertemuan bersama yang terbentuk belum efektif, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya pertemuan rutin yang sangat penting untuk kemajuan kolaborasi, dan (3) kegiatan lapangan kolaborasi belum

efektif, karena kolaborasi antar aktor yang terbentuk tidak merata, jarang terbentuk pergerakan kolaborasi bersama dilapangan (Ist, 2016).

c. Dampak Dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi

Dampak dalam CGR yang dimaksud adalah dampak sementara yang muncul selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah “small-wins” yaitu hasil-hasil positif yang terus memberlangsungkan semangat para aktor. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kolaborasi. Dampak tidak terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi (Ist, 2016).

Berbagai macam dampak tersebut menghasilkan umpan balik atau feedbacks, yang kemudian akan di adaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana proses kolaborasi mampu menyikapi feedback dari masing-masing aktor yang ada. Adaptasi yang baik adalah yang memungkinkan dapat dilakukan oleh seluruh aktor kolaborasi, artinya tidak ada pengaruh kepentingan organisasi di atas kolaborasi, sehingga menyebabkan terjadinya usaha mengambil mafaat kolaborasi secara lebih untuk kepentingan organisasi sendiri. Adaptasi harus berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan utama untuk dirubah di dalam kolaborasi, sehingga hal tersebut dapat menjaga kemajuan kolaborasi (Ist, 2016).

C. Pengelolaan Pariwisata

1. Pariwisata

Pengertian mengenai pariwisata secara etimologis Pariwisata berasal dari Bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan Wisata. Pari yang berarti ber ulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan wisata berarti

perjalanan atau bepergian jadi dapat disimpulkan bahwa Pariwisata yaitu perjalanan yang dilakukan secara berputar-putar, berulang-ulang atau berkali-kali. Saputro dalam Saputra (2019) mengemukakan bahwa pariwisata adalah sebuah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan/rutinitas sehari-hari, keluar dari kediamannya. Secara demikian pariwisata berarti dari kata pariwisata suatu perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 pasal 1, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Sedangkan Pariwisata menurut Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah. Menurut Spinllane dalam Fitriana (2013) pariwisata sudah ada sejak peradaban manusia dimulai, hal itu ditandai dengan ditandai oleh adanya pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan agama. Manusia menyadari jika pariwisata merupakan agen perubahan yang mempunyai kekuatan besar dan dahsyat, namun kajian aspek sosial budaya dari kepariwisataan relatif jauh tertinggal.

Jenis-jenis wisata kemudian muncul dikarenakan di setiap daerah maupun suatu negara umumnya dapat menyajikan berbagai atraksi wisata agar dapat menarik perhatian pengunjung wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut.

Dari hal tersebut maka terdapat berbagai jenis pariwisata menurut Marpaung dalam Abdul (2015) yaitu :

a) Wisata untuk menikmati perjalanan

Pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mendapatkan ketenangan di luar kota dan sebaliknya (Marpaung dalam Abdul, 2015).

b) Wisata untuk rekreasi

Jenis wisata ini dilakukan oleh orang yang menghendaki pemanfaatan hari libur untuk beristirahat, melepaskan segala keletihan dan kelelahan, dengan mengunjungi tempat yang dianggap menjamin tujuan rekreasi mereka, seperti tepi pantai, pegunungan, dan tujuan untuk menemukan kenikmatan mereka (Marpaung dalam Abdul, 2015).

c) Wisata untuk Kebudayaan

Jenis wisata ini ditandai dengan adanya rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar di pusat riset, mempelajari adat istiadat, dan mengunjungi monumen bersejarah. Selain jenis pariwisata juga terdapat bentuk pariwisata yang merupakan semua yang berhubungan dengan objek yang dapat disaksikan pengunjung pada situasi tertentu dan waktu yang tepat, serta kemauan untuk mengunjungi objek tersebut. Adapun bentuk dan jenis pariwisata menurut Yoeti dalam Fitriana (2013) di kelompokkan menjadi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Letak Geografi, yaitu pariwisata lokal, pariwisata regional, nasional tourism, regional international tourism, international tourism.

- b. Berdasarkan Tujuan yaitu pariwisata rekreasi, pariwisata budaya, pariwisata olahraga, pariwisata sosial, pariwisata kesehatan, pariwisata politik, pariwisata keagamaan
- c. Berdasarkan pengaruh terhadap neraca pembayaran yaitu pariwisata aktif adalah kegiatan pariwisata yang mendatangkan devisa dengan masuknya wisatawan asing ke dalam suatu negara tertentu, pariwisata pasif adalah kegiatan pariwisata yang mengurangi cadangan devisa negara ditandai dengan keluarnya penduduk ke suatu negara lain ke negara lain untuk melakukan kegiatan kunjungan.
- d. Menurut alasannya yaitu seasonal tourism adalah kegiatan pariwisata yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, occasional tourism (kegiatan pariwisata yang dilakukan menurut kejadian atau event tertentu).

2. Pengelolaan Pariwisata

Pengertian dasar yang wajib diketahui dalam perencanaan pariwisata adalah mengetahui komponen-komponen pengembangan pariwisata dan hubungan internal di antara komponen-komponen tersebut. Pengembangan adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu di tata sedemikian baik dengan cara merawat yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru.

Menurut Hadinoto dalam Fitriana (2013) ada beberapa hal yang menentukan dalam pengembangan suatu obyek wisata, yaitu:

- a. Atraksi Wisata. Atraksi merupakan suatu daya tarik wisatawan untuk berlibur. Atraksi yang diidentifikasi (sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan sebagainya) perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata.

Tanpa atraksi wisata, tidak ada peristiwa, bagian utama lain tidak akan diperlukan.

- b. Promosi dan Pemasaran. Promosi dan pemasaran merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi merupakan bagian penting
- c. Pasar Wisata (Masyarakat pengirim wisata). Pasar wisata merupakan bagian yang penting. Walaupun untuk perencanaan belum atau tidak diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun informasi mengenai trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi, dan sebagainya dari wisatawan perlu dikumpulkan dari mereka yang berlibur.
- d. Transportasi. Transportasi mempunyai dampak yang besar terhadap volume dan lokasi pengembangan pariwisata.
- e. Masyarakat Penerima Wisatawan yang Menyediakan Akomodasi dan Pelayanan Jasa Pendukung Wisata (fasilitas dan pelayanan).

Pengembangan wisata harus diimbangi dengan pengelolaan pariwisata yang tepat agar dapat menimbulkan dampak yang positif. Pengelolaan Pariwisata merupakan indikator penting dalam kegiatan pengembangan pariwisata, tanpa pengelolaan pariwisata tentu tidak akan terciptanya sapa pesona yang akan menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Pengelolaan pariwisata haruslah pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjadikan pariwisata tersebut sebagai daya tarik bagi wisatawan. Menurut Peraturan Menteri Pariwisata No 14 Tahun 2016 pengelolaan berkelanjutan adalah pengelolaan yang mampu memenuhi kebutuhan

dan aspirasi manusia saat ini, tanpa harus mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa yang akan mendatang

Menurut Terry dalam Kanuna (2014) pengelolaan (management) merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sejalan dengan Terry dkk dalam Kanuna (2014) juga mendefinisikan manajemen sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan atas human and national resources (terutama human resources) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.

Kanuna (2014) Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

- a. Perencanaan (*Planning*), adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*), adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.
- c. Pelaksanaan (*Actuating*), adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.
- d. Pengawasan (*Controlling*), adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana.

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip- prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Cox dalam Amim (2017), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip- prinsip berikut:

- a. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
- b. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- c. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
- d. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
- e. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (carrying capacity) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

D. Wisata Pantai

1. Wisata

Menurut undang -undang pemerintah nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau

kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sementara Wisata menurut Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya bahwa wisata kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Sehingga pada pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wisata lebih menekankan pada kegiatan yang dilakukan wisatawan dalam sebuah perjalanan pariwisata. Dalam sebuah perjalanan wisata, wisatawan mengunjungi suatu tempat wisata maka wisatawan tersebut dapat dikatakan telah melakukan kegiatan wisata. Dalam artian kegiatan dilakukan adalah untuk menikmati objek-objek wisata. Hal tersebut merupakan gambaran dari kegiatan dalam sebuah perjalanan pariwisata. Dimana kegiatan dalam pariwisata ini sangat ditentukan oleh minat dari wisatawan itu sendiri. Tidak hanya ditentukan oleh minat wisatawan melainkan berdasarkan sumber daya pariwisata yang tersedia. Oleh karena itu banyak muncul istilah wisata sejarah, wisata budaya, wisata alam, wisata edukasi dan jenis wisata lainnya. Menurut (Nafis, 2016) wisata memiliki karakteristik-karakteristik diantaranya adalah:

- a. Bersifat sementara, dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya.
- b. Melibatkan komponen-komponen wisata, seperti sarana transportasi, akomodasi, restoran, objek wisata, tiki cinderamata dan lain-lain.
- c. Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek wisata dan juga atraksi wisata.

- d. Memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan.
- e. Tidak untuk mencari nafkah ditempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang dikunjungi (Suyitno dalam Nafis, 2016)

2. Wisata Pantai

Pantai adalah perbatasan antara daratan dan laut, sedangkan laut adalah kumpulan air dalam jumlah banyak yang membagi daratan atas benua-benua dan pulau-pulau. Pariwisata pantai merupakan bagian dari wisata pesisir yang memanfaatkan pantai sebagai objek dan daya tarik pariwisata. Pariwisata pantai meliputi semua kegiatan wisata yang berlangsung di daerah pantai seperti menikmati keindahan alam pantai, olahraga pantai, sun bathing, piknik, berkemah dan berenang di pantai. Jadi, wisata pantai dapat diartikan sebagai wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam pantai beserta komponen pendukungnya, baik alami maupun buatan atau gabungan keduanya itu (Simond dalam Musyafa', 2014).

Obyek wisata pantai adalah elemen fisik dari pantai yang dapat dijadikan lokasi untuk melakukan kegiatan wisata, obyek tersebut yaitu (Simond dalam Musyafa', 2014):

- a. Pantai, merupakan daerah transisi antara daratan dan lautan. Pantai merupakan primadona obyek wisata dengan potensi pemanfaatan, mulai dari kegiatan yang pasif sampai aktif.
- b. Permukaan laut, terdapatnya ombak dan angin sehi ngga permukaan tersebut memiliki potensi yang berguna dan bersifat rekreatif.

- c. Daratan sekitar pantai, merupakan daerah pendukung terhadap keadaan pantai, yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan olah raga darat yang membuat para pengunjung akan lebih lama menikmatinya.

Simond dalam Musyafa' (2014) juga menyebutkan bahwa pantai dapat dibagi menjadi berbagai wilayah, yaitu:

- a. Beach, yaitu batas antara daratan dan lautan. Biasanya berupa pantai berpasir dan landai.
- b. Dune, yaitu daerah yang lebih tinggi dari beach. Biasanya berupa hamparan pasir yang permukaannya bergelombang atau berubah secara perlahan karena aliran laut.
- c. Coastal, yaitu daerah yang secara periodik digenangi air yang merupakan gabungan antara beach dan dune.

3. Konservasi Pantai

Pantai tidak hanya dimanfaatkan sebagai objek wisata alam, namun dapat pula dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi dan edukasi yang juga berpotensi sebagai daya tarik wisata. Konservasi berasal dari kata Conservation yang terdiri atas kata con (together) dan servare (keep/save) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (keep/save what you have), namun secara bijaksana (wise use). Ide ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang (Mulyadi, Edi, dan

Fitriani. N, 2010). Pantai sebagai kawasan konservasi perairan (KKP) laut secara individu maupun jaringan merupakan suatu alat utama dalam melindungi keanekaragaman hayati di perairan laut. Kawasan konservasi mempunyai peran yang sangat besar terhadap keanekaragaman hayati. Kawasan konservasi juga merupakan pilar dari hampir semua strategi konservasi nasional dan internasional yang berfungsi sebagai penyedia jasa ekosistem, melindungi spesies yang terancam, dan mitigasi perubahan iklim (Dudley dalam Widhiarini, 2018).

Menurut Rodger dalam Widhiarini (2018), wisata edukasi atau edutourism adalah suatu program dimana wisatawan berkunjung ke suatu lokasi wisata dengan tujuan utama untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung di objek wisata yang dikunjungi. Program pariwisata pendidikan dapat berupa pertukaran siswa antara lembaga pendidikan (student exchanges), ekowisata (ecotourism), wisata warisan (heritage tourism), wisata komunitas (community tourism), maupun wisata pedesaan atau pertanian (rural/farm tourism). Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan jika wisata konservasi dan edukasi adalah suatu jenis wisata yang kegiatannya bertujuan untuk memberikan pendidikan atau pemahaman terhadap pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan dari kerusakan atau pencemaran untuk keberlangsungan ekosistem makhluk hidup dan lingkungannya (Widhiarini, 2018).

Ada berbagai macam konservasi yang dapat dilaksanakan di daerah pesisir atau wilayah pantai, diantara sekian macam konservasi tersebut terdapat konservasi cemara laut dan hutan mangrove. Konservasi hutan mangrove adalah usaha perlindungan, pelestarian alam dalam bentuk penyisihan areal sebagai kawasan suaka alam baik untuk perairan laut, pesisir, dan hutan mangrove (Anonim, 2007).

Keberadaan hutan mangrove memberikan manfaat pada masyarakat pesisir berupa barang yang didapat melalui peningkatan hasil tangkapan dan perolehan kayu bakau yang mempunyai nilai ekspor tinggi. Selain itu, kawasan hutan mangrove juga menyediakan jasa lingkungan yang sangat besar, yaitu perlindungan pantai dari badai dan erosi serta pendapatan langsung bagi masyarakat manusia melalui kegiatan wisata (Wardhani, 2011). Dengan demikian, potensi ekonomi mangrove diperoleh dari tiga sumber utama yaitu hasil hutan, perikanan estuarin dan pantai (perairan dangkal), serta wisata alam.

Konservasi cemara laut/udang merupakan upaya pengurangan dampak terhadap wilayah pantai berpasir yang memiliki masalah utama antara lain terjadi erosi angin yang berlangsung terus menerus, sehingga kondisi lahan marginal dan sering ditelantarkan. Peristiwa rutin yang terjadi setiap hari tersebut menjadikan lahan pantai berpasir dari hari ke hari semakin memburuk, baik untuk wilayah itu sendiri maupun wilayah yang ada di belakangnya dan lahan di sekitar pesisir pantai (Harjadi, 2017). Dampak buruk peristiwa erosi angin di daerah pantai mengakibatkan tanah lahan pantai berpasir bertekstur kasar dan bersifat lepas sehingga sangat peka atau sensitif terhadap erosi angin, hasil erosi berupa endapan pasir (sand dune) akan menutupi tanaman budidaya di sekitar gisik (gundukan pasir) dan pemukiman yang berada di belakangnya, dan butiran pasir yang mengandung garam terbawa dalam proses erosi angin akan dapat merusak dan menurunkan produktivitas tanaman (Hani dan Rachman dalam Harjadi 2017). Cemara laut/udang pohon cemara udang di sekitar pantai juga bermanfaat untuk menahan ombak pada saat tsunami (Pinto, 2015). Keberadaan cemara laut/udang yang eksotis menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan, sehingga kawasan pantai

yang melakukan konservasi cemara laut selain mengurangi kerusakan di wilayah pesisir juga dapat menjadi sektor pariwisata pantai.

